



## Implementasi Optimalisasi Program Kalimasada Sebagai Penunjang Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Kelurahan Petemon)

Widya Dharmawan<sup>1</sup>, Tukiman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

---

### Abstract

Received: 15 Juli 2023  
Revised: 20 Agustus 2023  
Accepted: 27 Agustus 2023

*KALIMASADA atau singkatan dari Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan merupakan inovasi dari Pemerintah Kota Surabaya yang bertujuan memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan, dengan melibatkan ketua RT sebagai RT rintisan KALIMASADA dan kader surabaya hebat (KSH) dengan jangkauan yang paling dekat dengan warga. Program KALIMASADA dikelurahan petemon dinilai sudah terimplementasi dengan baik akan tetapi ada beberapa elemen yang masih kurang maksimal seperti kurangnya informasi dan sosialisasi membuat warga jadi ragu untuk mencoba hal baru. Selain itu, jumlah tenaga kerja kependudukan tidak sebanding dengan jumlah warga membuat program KALIMASADA menjadi terhambat. Padahal, inovasi ini dapat membantu warga dalam mempermudah pengurusan dokumen kependudukan. Metodologi yang akan digunakan oleh penulis berupa kualitatif, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan, wawancara narasumber dan pihak terkait, serta studi dokumen sebagai pelengkap data yang diperlukan. Pertama, penulis akan turun ke lapangan untuk melihat progres berjalannya program KALIMASADA di Kelurahan Petemon tempat penulis ditugaskan. Fokus penelitian ini yaitu implementasi optimalisasi program KALIMASADA guna menunjang masyarakat tertib adminduk khususnya pada Kelurahan Petemon. Hasil dari pengabdian masyarakat berupa sosialisasi dan komunikasi serta tertibnya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dokumen kependudukan yang dilakukan akan mampu mengoptimalkan program KALIMASADA sehingga kegiatan program KALIMASADA akan menjadikan Kelurahan Petemon dan Kota Surabaya dapat menjadi contoh dan menjadi lebih baik dari sebelumnya.*

**Kata Kunci:** KALIMASADA, Administrasi Kependudukan, Implementasi Kebijakan

(\*) Corresponding Author: [Widyadharmawan13@gmail.com](mailto:Widyadharmawan13@gmail.com)

**How to Cite:** Dharmawan, W., & Tukiman, T. (2023). Implementasi Optimalisasi Program Kalimasada Sebagai Penunjang Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Kelurahan Petemon). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8321494>.

---

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara di dunia dengan penduduk terpadat. Banyaknya penduduk di Indonesia tentunya masalah mengenai kependudukan juga tidak akan pernah habis (Saraswati, 2018). Birokrasi merupakan jembatan dalam menjalankan fungsi aparatur negara untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan warga negara. Pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kelompok atau badan yang dapat memberikan kepuasan meskipun hasil dari pelayanan yang diberikan tidak ada hubungannya

dengan produk fisik. Perkembangan Era juga ikut serta dalam perkembangan teknologi digital.

Hal ini juga tercermin dari munculnya banyak inovasi-inovasi atau hanya sekedar pembaharuan dari aplikasi lama yang diimplementasikan dari perkembangan sistem digital. Beberapa Ada juga birokrasi yang mengatur inovasi digital berupa tingkatan layanan lama dengan menambahkan fitur baru dan lebih banyak variasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aplikasi digital yang dikembangkan dari juga terkait dengan mendukung birokrasi masing-masing daerah untuk mempermudah pelayanan publik.

Pemerintah Daerah Kota Surabaya telah mengeluarkan Kebijakan Pelayanan Publik terkait dengan pengelolaan kependudukan yang tercantum dalam peraturan daerah kota surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kependudukan di Kawasan Perkotaan Surabaya. Dengan kebijakan manajemen kependudukan, diharapkan proses ini akan terjadi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dapat dilakukan secara efektif sesuai dengan Prinsip pelayanan publik yang prima adalah cepat, tepat dan akurat. Administrasi kependudukan menjadi sangat penting karena selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan di Indonesia.

Kelurahan merupakan ujung tombak dalam suatu struktur pemerintahan terbawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Kantor Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan sebagai salah satu penyelenggara kebijakan pelayanan adminduk yang berada pada Kota Surabaya yang memiliki wilayah sebesar 135 Ha2 Luas Tanah 244 M dan Luas Bangunan 310 M mata pencaharian penduduk sebagian besar pegawai swasta serta wiraswasta dan sebagian besar berpenduduk Agama Islam.

Suatu ikatan yang bersinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat merupakan arti dari good governance. Good governance merupakan suatu rancangan pemerintahan yang bagus serta mengarah pada pembangunan zona masyarakat. Hal ini memiliki tujuan akhir yaitu kenaikan pembangunan serta keselamatan khalayak. Ketentuan untuk mewujudkan good governance terdapat beberapa hal dalam prinsip dasar mencakup partisipatoris, rule of law (penguatan hukum),transparan, efektifitas dan efisiensi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya merupakan dinas yang menjalankan urusan pelaksana otonom daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dengan tugas meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan urusan pemerintah serta pelayanan publik, dan pengelolaan ketatausahaan dinas.

Padatnya jumlah penduduk di Kota Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya melalui Dispendukcapil Kota Surabaya ini untuk meluncurkan inovasi-inovasi yang dapat mempermudah segala bentuk dokumen permohonan penduduk yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Salah satu inovasi untuk menjalankan tugasnya pada pelayanan urusan pemerintahan serta pelayanan publik, Dispendukcapil Kota Surabaya menciptakan KALIMASADA (Kawasan Lingkungan Sadar Adminduk)

KALIMASADA merupakan singkatan dari Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk, yang merupakan program Pemerintah Kota Surabaya yang diluncurkan pada Kamis, 18 November 2021. Tujuan dari

dibentuknya program ini yaitu agar lebih memudahkan masyarakat Kota Surabaya dalam pengurusan keperluan-keperluan yang berkaitan dengan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Sistem KALIMASADA adalah mengadakan pelayanan adminduk di tingkat RT, yang bersifat gratis tanpa adanya pemungutan biaya apapun. Pelayanan adminduk yang dapat ditemukan di RT KALIMASADA ini terdapat 4 pelayanan, diantaranya terdiri dari pembuatan akta kematian, pembuatan akta kelahiran, pengurusan pindah masuk, dan pengurusan pindah keluar. Dengan menyediakan pelayanan adminduk di tingkat RT diharapkan masyarakat lebih mudah karena didekatkan dalam hal pengurusan dan melengkapi kebutuhan dokumen tanda kependudukan. Menjalankan program KALIMASADA bukanlah hal yang sulit.

Ketua RT hanya perlu mendaftarkan diri melalui kelurahan untuk kemudian disampaikan ke Dispendukcapil, kemudian RT rintisan akan diberi username password akun untuk login ke website KALIMASADA. Kurangnya informasi dan sosialisasi membuat warga menganggap setiap inovasi baru yang hadir pasti selalu sulit dan rumit, sehingga membuat program-program tersebut sepi peminat dan mengalami kemacetan. Masyarakat yang sudah berumur mayoritas mengalami keterbatasan pemahaman dalam mengikuti teknologi (gagap) sehingga dibanding mengikuti inovasi baru, mereka lebih memilih untuk memakai metode lama dengan datang ke Kantor Kecamatan dan Kelurahan terdekat untuk pengurusan dokumen kependudukan.

Program KALIMASADA ini juga tidak terlepas dari permasalahan yang ada seperti pada temuan mahasiswa msib yaitu beberapa temuan permasalahan dapat dipaparkan, yakni kurangnya kesadaran masyarakat akan kelengkapan data Adminduk, sehingga sulit bagi Pemkot Surabaya untuk mengintervensi data agar bisa disasar. . Serta masih banyak warga yang belum memiliki pengetahuan teknologi dalam menggunakan teknologi informasi, belum semua warga memiliki kapasitas dan dukungan dalam hal sarana dan perangkat untuk mengakses layanan digital tersebut. Kurangnya sosialisasi kepada warga dari RT rintisan KALIMASADA juga kurangnya antusiasme RT pada program KALIMASADA ini. juga menjadi faktor sulitnya menyusutkan program ini

Oleh karena itu mahasiswa MSIB hadir sebagai pendorong pengoptimalan program KALIMASADA ini agar masyarakat lebih tertip untuk administrasi kependudukan. terdapat sejumlah faktor-faktor yang bisa menjadi titik pendorong program KALIMASADA ini menjadi optimal dan menghasilkan output yang efektif dan efisien. Inilah merupakan tugas peserta magang msib dispendukcapil untuk mencari cara agar masyarakat semakin tertib adminduknya dalam program KALIMASADA yang diselenggarakan oleh dispendukcapil khususnya kelurahan petemon.

Administrasi Kependudukan merupakan dasar semua pelayanan yang diberikan kepada masyarakat mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan mendorong Dispendukcapil berinovasi melalui program KALIMASDA (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan). Masyarakat dapat mengurus administrasi kependudukan melalui web aplikasi KLAMPID, namun untuk warga yang tidak memiliki akses internet dapat mengurus melalui RT. Sebagai proyek rintisan, terdapat 62 RT rintisan yang dipilih untuk melaksanakan

program KALIMASADA dan akan di kembangkan di seluruh RT di Surabaya. Hasil yang diharapkan melalui program KALIMASADA adalah tersedianya data kependudukan yang mutakhir. Mahasiswa akan terlibat dalam optimalisasi program KALIMASADA yang sudah berjalan dan akan diimplementasikan pada setiap RW, sebagai pendamping masyarakat agar sadar administrasi kependudukan. Sehingga, masyarakat dapat memperoleh dokumen administrasi kependudukan dengan mudah dan cepat.

## **LANDASAN TEORI**

### **Implementasi Kebijakan**

Menurut Perlu dipahami bahwa implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel-variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik dan untuk mempermudah pemahaman maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan. Ada banyak model implementasi kebijakan menurut para ahli, diantaranya Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

#### **(1) Komunikasi**

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

#### **(2) Sumber Daya**

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program.

#### **(3) Disposisi**

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor

terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.

#### (4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan

#### **Optimalisasi Kebijakan**

Menurut (Mohammad Nurul Huda, 2018) Optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi optimalisasi disini mempunyai arti berusaha secara optimal untuk hasil yang terbaik untuk mencapai dalam penerapan manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah direncanakan. Optimal erat kaitannya dengan kriteria untuk hasil yang diperoleh. Sedangkan Menurut Winardi dalam Bayu (2017) Optimaslisai adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

#### **KALIMASADA (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk)**

Program KALIMASADA (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk) adalah salah satu program Dispendukcapil Kota Surabaya untuk lebih mengoptimalkan pelayanan Administrasi untuk masyarakat. Program ini di sah kan oleh Eri Cahyadi selaku Walikota Surabaya pada tanggal 18 November 2021. Pada saat Walikota mengesahkan program ini beliau berharap beberapa layanan adminduk bisa diurus oleh warga melalui ketua RT rintisan yang telah ditunjuk untuk membantu program KALIMASADA ini. Peluncuran kegiatan ini dapat mengurus beberapa permohonan seperti akta kematian, akta kelahiran, pindah masuk dan pindah keluar tanpa harus mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya.

Menurut Wulansari (2023) melalui KALIMASADA masyarakat tentu saja menjadi lebih terbantu dalam segala hal berkaitan dengan pengurusan administrasi kependudukan. Strategi dalam KALIMASADA ini dibantu oleh para perwakilan baik dari RW ataupun RT serta Kader Surabaya Hebat (KSH) untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau warga terkait dengan KALIMASADA serta cara penggunaan KNG.

#### **METODE**

Metodologi yang akan digunakan oleh penulis berupa kualitatif, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan, wawancara narasumber dan

pihak terkait, serta studi dokumen sebagai pelengkap data yang diperlukan. Pertama, penulis akan turun ke lapangan untuk melihat progres berjalannya program KALIMASADA di Kelurahan Petemon tempat penulis ditugaskan. Fokus penelitian ini yaitu implementasi optimalisasi program KALIMASADA guna menunjang masyarakat tertib adminduk khususnya pada Kelurahan Petemon.

Pada penelitian ini jurnal menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer meliputi informan, dokumen atau arsip, dan catatan penelitian. Data sekunder meliputi dokumentasi, jurnal, laporan, buku, dan referensi dari internet ataupun media online yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Penulis melakukan observasi di lokus penelitian yaitu Kelurahan Petemon untuk meninjau pelaksanaan KALIMASADA. Wawancara dilakukan kepada beberapa warga, Ketua RT Pelaksana program KALIMASADA, dan petugas di Kelurahan Petemon. Studi dokumen dilakukan berupa arsip foto, dan dokumentasi lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam Implementasi KALIMASADA yang dilakukan oleh Kelurahan Petemon bertujuan agar warga petemon semakin sadar akan pentingnya tertib administrasi kependudukan. Masyarakat semakin didekatkan dengan layanan pemerintahan terdekat lewat KALIMASADA contohnya RT. Kelurahan petemon sendiri memiliki 10 RT rintisan KALIMASADA. Setelah mendapat informasi ini, penulis mengajukan permohonan untuk bertemu dengan RT rintisan aktif. Pertemuan ini dijemput oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Petemon, dengan tujuan mendapatkan informasi terkait KALIMASADA untuk kemudian diteruskan ke masyarakat dalam sosialisasi lanjutan dan pembinaan warga.

Setelah mendapat cukup informasi, mahasiswa mulai membuat plan untuk melakukan sosialisasi ke warga dan pembinaan RT rintisan baru KALIMASADA. Dalam upaya sosialisasi, penulis dibantu oleh pegawai Kelurahan Petemon .10 RT ini juga diberi akun KNG untuk membantu warga melakukan pengurusan dokumen kependudukan tanpa harus datang ke siola maupun ke kelurahan itupun sebagai salah satu output pemerintah terhadap layanan KALIMASADA itu sendiri menjadikan pemerintahan yang efisien dan efektif.

Pengujian keberhasilan implementasi KALIMASADA kelurahan petemon menurut teori George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu :

### **1). Komunikasi**

Pada aspek ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya menekankan adanya Sinkronisasi komunikasi antara siap stakeholder yang berkepentingan dalam kesuksesan program KALIMASADA seperti Kecamatan, kelurahan, RW, RT, Kader surabaya hebat. Semua dituntut untuk ikut serta dalam mewujudkan kesuksesan program KALIMASADA.

Seperti yang dikatakan bapak walikota surabaya terkait harapan KALIMASADA bagi warga surabaya sebagai berikut : "Saya berharap di tingkat level yang paling dekat dengan masyarakat, yakni RT, itu semuanya data

(Adminduk) nanti bisa diselesaikan tanpa harus bertemu dengan Dispendukcapil," ujar walikota surabaya Eri Cahyadi.

Kelurahan Petemon sendiri juga melakukan penerapan komunikasi seperti melakukan sosialisasi kepada 10 RT rintisan KALIMASADA. Meskipun penulis menjumpai ada beberapa RT rintisan maupun warga yang kurang antusias akan tetapi kelurahan petemon dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya oleh karena itu lewat bantuan Mahasiswa magang MSIB dengan cara door to door kerumah warga membuat jarak antara komunikasi pemerintah ke masyarakat semakin dekat dan efisien.

## 2). Sumber daya

Pada sumber daya yang dimiliki oleh petemon masih terbilang belum mencukupi dilihat dari jumlah warga petemon sendiri sebanyak 39.397 menurut data badan pusat statistik kota surabaya pada tahun 2019.

Kelurahan	Penduduk	KK	Rata-rata Anggota Keluarga
001. Pakis	39,063	12,122	3.22
002. Putat Jaya	49,249	14,716	3.35
003. Banyu Urip	42,459	13,054	3.25
004. Kupang Krajan	25,570	7,723	3.31
005. Petemon	39,397	12,473	3.16
006. Sawahan	20,676	6,662	3.10
Kecamatan Sawahan	216,414	66,750	3.24

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya*

Jika memacu pada data diatas kelurahan petemon dapat dikatakan belum mencukupi dalam hal sumber daya yang meliputi jumlah staff dikarenakan hanya ada 6 staff kependudukan yang melayani administrasi kependudukan. Dengan kurangnya staff ini membuat proses suksesnya program KALIMASADA kelurahan petemon sedikit terhambat dikarenakan para staff yang harus membagi fokus antara pelayanan administrasi kependudukan di kantor dengan melaksanakan program KALIMASADA ini. Akan tetapi kelurahan petemon terus mengevaluasi hingga mendapatkan solusi yang terbaik.

## 3). Disposisi

Disposisi dalam implementasi kebijakan program KALIMASADA ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan Kelurahan Petemon memiliki karakter yang paling penting yang harus dimiliki oleh implementor yaitu kejujuran, komitmen, dan demokratis. Dikarenakan dalam pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran dan tujuan serta keinginan pembuat kebijakan.

#### 4). Struktur Birokrasi

Salah satu aspek struktur yang tidak kalah penting dari setiap lembaga pemerintahan ataupun organisasi yaitu terdapat adanya pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya seperti SOP (standard operating procedures) atau dasar hukum yang mengikat seperti Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres no 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga. Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya melaksanakan program KALIMASADA dengan berpedoman kepada dasar hukum dan struktur birokrasi yang berlaku

### **KESIMPULAN**

#### **Kesimpulan**

Implementasi program optimalisasi KALIMASADA yang dilakukan oleh Kelurahan Petemon diharapkan membawa hasil yang memuaskan bagi warga petemon. Hal ini karena setelah dilakukannya sosialisasi dan pembinaan secara door to door yang membuktikan bahwa program ini sangat mudah dan efektif, kuota target RT rintisan Kelurahan Petemon berhasil terpenuhi. Dengan begitu proses Administrasi Kependudukan akan semakin mudah dijangkau oleh warga Kelurahan Petemon. Karena itu, diharapkan tidak ada lagi warga yang tertinggal mengenai kelengkapan dokumen Administrasi Kependudukan.

Meskipun hambatan dan gangguan yang terjadi pada program KALIMASADA ini seperti komunikasi dan jumlah tenaga kerja khususnya pada kelurahan petemon. Kelurahan petemon sendiri terus melakukan evaluasi sehingga. Harapan untuk kegiatan KALIMASADA yang sudah disahkan pada tahun 2021 ini akan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya dan semoga bisa menjadi panutan bagi wilayah luar Kota Surabaya sehingga bisa menjadikan Indonesia sebagai negara yang bijak dan tertib akan administrasi kependudukan.

Jadi Kesimpulan yang dapat diambil dari implementasi optimalisasi KALIMASADA Kota Surabaya ini yaitu bahwa kebijakan yang bagus secara konseptual dan dirumuskan melalui cara-cara yang demokratis dan melibatkan semua stakeholders hanya akan di atas kertas jika tidak diimplementasikan dengan baik dan dilakukan melalui proses yang benar.

#### **Saran**

Berdasarkan pembahasan terkait dengan implementasi optimalisasi program KALIMASADA sebagai penunjang masyarakat tertib administrasi kependudukan studi kasus kelurahan petemon kota surabaya, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat dijadikan referensi untuk mengoptimalkan program KALIMASADA pada kelurahan petemon kota surabaya

1. Kelurahan Petemon harus lebih lagi meningkatkan sosialisasi dan kesadaran kepada warga akan pentingnya kelengkapan dokumen administrasi kependudukan
2. Kelurahan Petemon, RT, Kader Surabaya Hebat harus lebih lagi meningkatkan komunikasi agar segala urusan dapat tersinkronisasi dengan baik dan menghindari adanya miskomunikasi.

3. Perlunya peningkatan semangat dan antusiasme kepada RT rintisan agar dapat menjalankan program KALIMASADA dengan baik dikarenakan jika RT antusias maka warganya pun akan mengikuti.
4. perlunya penambahan staff kepegawaian khususnya bagian administrasi kependudukan atau bisa juga diberikan staff khusus untuk optimalisasi program KALIMASADA agar pegawai tidak terpecah fokus dalam melayani administrasi kependudukan mengingat banyaknya warga petemon tidak sebanding dengan pegawai yang ada pada Kelurahan Petemon
5. Kelurahan Petemon harus berupaya melakukan sosialisasi aplikasi penunjang KALIMASADA yaitu KNG kepada masyarakat terutama RT rintisan setempat, agar warga bisa melakukan pengurusan secara mandiri dengan benar ataupun bisa melakukan pengurusan ke RT setempat agar lebih mudah dan dekat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

*UU Nomor 24 Tahun 2013.* tentang Administrasi Kependudukan

*PERDA NO 4 TH 2017.* tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga.

Diah Wahyuningtias, P., & Rasyidah, R. (2023). OPTIMASI KALIMASADA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN GAYUNGAN, KOTA SURABAYA. *Communnity Development Journal*, 4(1), 278–283.

Prasasti, J., Putri, A., Murti, I., & Rahmadanik, D. (n.d.). *Implementasi E-Klampid Di Kelurahan Ngagel Rejo Kota Surabaya Untuk Meningkatkan Kemudahan Pelayanan Administrasi Kependudukan.* surabayakota.bps.go.id

Aldi, M., Sumarno, P., Sukristyanto, A., & Hariyoko, Y. (2022). Pelayanan Publik Melalui E-Klampid dalam Mewujudkan Administrasi Kependudukan Berbasis Good Governace di Kota Surabaya. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 2(2), 50–56. <https://doi.org/10.22225/jcpa.2.2.4907.50-56>

Pratama, W. O., & Maulana, D. (n.d.). *IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN KALIMASADA ADMINDUK DITINGKAT RT KOTA SURABAYA.*

*ANALISIS KEPATUHAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA DISPENDUKCAPIL SURABAYA* Nurfadila Nurfadila226@gmail.com Nur Handayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. (n.d.).

Fadhil, M., & Ilham, M. (n.d.). PERANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENGOPTIMALISASI PELAYANAN GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (GISA) DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT. In *FEBRUARI* (Vol. 1, Issue 1). <https://www.census.gov/popclock/world>